

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa

Secara fisiologis, pembangunan diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan beragam alternatif humanis untuk pencapaian aspirasi masyarakat (Rustiadi, 2006).

Pembangunan ekonomi desa adalah suatu proses dimana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

Terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan ekonomi pada suatu kawasan yakni: (1) membuka kesempatan kerja yang berkualitas bagi penduduk, (2) mencapai situasi perekonomian yang stabil, dan (3) membangun beragam basis ekonomi dan kesempatan kerja (Jamli, 2003). Artinya desa harus mengenal dengan baik potensi yang dimilikinya, serta memberdayakan berbagai sumber daya tersebut sebagai dasar dalam pembangunannya. Dengan demikian, perekonomian pedesaan selayaknya memperhatikan antarai lain kondisi ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan sumber daya insani, serta infrastruktur yang tersedia untuk mencapaikerangkaian tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan pada pertimbangan aspek-aspek tersebut,

selanjutnya disusun perencanaan pembangunan kawasan pedesaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan tersebut menekankan pada pembangunan berbasis sumber daya lokal potensial untuk menciptakan peluang pekerjaan dan memacu kegiatan perekonomian baru berbasis lokal (Blakely, 1994).

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang saling berkaitan, yaitu penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terwujudnya mata rantai kehidupan yang berkelanjutan (Dendi, 2004). Dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi di kawasan pedesaan, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan, diantaranya seperti yang direkomendasikan oleh(Anton, 2008) yaitu Pertama, peningkatan kemampuan produsen di kawasan pedesaan, agar mampu bersaing dengan produk yang berasal dari luar kawasan pedesaan yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas produksi dan memperbesar peluang distribusi keluar hasil produksi. Kedua, memperbaiki kerjasama antar *stakeholder* agar dapat saling mendukung dan memperkuat proses produksi serta distribusi. Ketiga, mengalokasikan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang berpotensi untuk berkembang, akan tetapi tidak lantas melupakan kelompok lainnya yang masih berkembang, serta membuat suatu pusat perdagangan sebagai media interaksi antar kelompok usaha dengan pasar.

Keberhasilan proses pengembangan ekonomi kawasan pedesaan, hendaknya memperhatikan komponen-komponen pendukung. Komponen lingkungan ataupun komponen infrastruktur desa memiliki peran dalam pencapaian tujuan pengembangan

perekonomian yang diharapkan. Investasi di bidang infrastruktur berperan besar dalam mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan (Anton 2008). Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan berperan penting dalam memperkuat posisi produsen (produksi barang/jasa). Fokus pengembangan ditujukan pada pembentukan basis kolektif masyarakat, minat penguatan kapasitas organisasi, peningkatan keterampilan dan kapasitas produsen, serta penyiapan sarana keterlibatan produsen dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. Produsen merupakan kelompok yang paling lemah dan memerlukan dukungan untuk meyarakan kepentingan mereka maupun untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mengorganisir para produsen ke dalam sebuah kelompok hanyalah merupakan salah satu bagian dari upaya untuk perbaikan. Peningkatan keterampilan dan kapasitas produsen dalam memproduksi dan menjalankan bisnis serta meningkatkan akses pasar, jauh lebih penting dari itu semua (Boulle et al 2004). Kapasitas produsen harus dibangun melalui dua pendekatan: Pertama, kapasitas organisasi agar memiliki suara yang kuat dan jelas dalam kemitraan, dan Kedua, pengembangan keterampilan untuk menjamin peningkatan produksi dalam klaster yang bersangkutan.

Konsep pengembangan ekonomi lokal yang pro-masyarakat miskin mementingkan beberapa prinsip pokok, yakni: (1) investasi pada peningkatan sumber daya manusia dan kapital sosial penduduk miskin; (2) kebijakan dan pelayanan yang menghasilkan tersedianya secara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar masyarakat (akses pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); (3) kebijakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga membuka peluang bagi

masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan dan atau nilai tambah dari usaha sendiri; (4) peningkatan akses masyarakat miskin kepada sumber daya ekonomi (modal, lahan, sarana produksi, informasi pasar dan lain-lain) dan (5) pembangunan yang ramah lingkungan (Dendi, dkk 2004). Dalam kaitannya dengan prinsip pengembangan ekonomi lokal yang *pro-poor*, dalam penentuan komoditas unggulan daerah, disamping kriteria-kriteria kelayakan teknis, permintaan pasar, serta efek *multiplier* suatu komoditi/produk sektoral terhadap sektor usaha lainnya, faktor potensi nilai tambah langsung bagi keluarga miskin juga sebagai kriteria penting (Dendi, 2004: 17).

2.1.2 Konsep Ekonomi Rumah Tangga

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (*Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*). Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi (M. Sholahuddin, 2007:3). Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit

yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu(Deliarnov 2009:2).

Ekonomi Rumah Tangga adalah unit terkecil dalam perekonomian yang memiliki 2 peran yaitu sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam rumah tangga keluarga harus memiliki penghasilan atau pendapatan yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi merupakan pemilik faktor produksi. Faktor produksi tersebut antara lain:

1. Tanah, bagi masyarakat pedesaan khususnya keluarga petani
2. Tenaga kerja
3. Keahlian
4. Modal

Kegiatan produksi yang dilakukan dalam rumah tangga keluarga adalah menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan pelaku ekonomi lainnya. Dalam kegiatan produksi inilah rumah tangga keluarga memperoleh penghasilan atau pendapatan dalam bentuk uang. Konsumsi dalam pengertian ekonomi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang/ jasa. Pengertian mengurangi atau menghabiskan disini dapat secara berangsurangsur atau sekaligus. Barang yang digunakan langsung untuk pemenuhan kebutuhan disebut barang konsumsi, misalnya makanan dan minuman. Adapun barang yang tujuannya untuk menghasilkan barang disebut barang produksi, misalnya kendaraan, komputer dan lain-lain. Rumah tangga keluarga merupakan kelompok yang paling sering melakukan kegiatan konsumsi. Sesuai

perannya, masing-masing anggota keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda baik dilihat dari jumlah maupun macamnya. Perbedaan kegiatan konsumsi tersebut disebabkan adanya perbedaan jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, cara dan kebiasaan hidup. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga keluarga pun berbeda-beda. Adapun faktor yang memengaruhi perbedaan kegiatan konsumsi yang terjadi dalam masing-masing rumah tangga keluarga yakni:

1. Jumlah pendapatan keluarga
2. Jumlah anggota keluarga
3. Tingkat harga barang atau jasa
4. Status sosial ekonomi keluarga

2.1.3 Konsep Pemberdayaan

Sulistiyan (2004:7) menjelaskan bahwa, secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan ada empat indikator pemberdayaan:

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan:

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki dari pada laki-laki.
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau

pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

2.1.3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *‘people-centered, participatory, empowering, and sustainable’* (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki *‘inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity’*. Pada bagian lain, Subejo dan Supriyanto (2005) menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki

kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. KTT Pembangunan Sosial di Copenhagen tahun 1992 juga telah memuatnya dalam kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diperdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

2.1.3.2 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya yang dilakukan untuk menghapus subordinasi perempuan, termasuk didalamnya adalah hak ekonomi, hak reproduktif, dan hak-hak resmi yang tidak diskriminatif. Pemberdayaan perempuan juga meliputi

segala aspek kehidupan termasuk kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan yang penting dalam langkah-langkah pemberdayaan tersebut.

Gender merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya manfaat dan akses terhadap pelayanan. Kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki yakni mengupayakan agar perempuan mempunyai akses dan kesempatan yang seimbang dan adil dalam kehidupannya. Pemberdayaan perempuan tidak dimaksudkan sebagai suatu hal yang memenangkan perempuan dari kuasa laki-laki tetapi seimbang dan setara untuk mendapatkan akses dan untuk memperoleh keadilan dalam kehidupan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, penting dalam langkah-langkah pemberdayaan tersebut. Dalam artian tidak ada perbedaan gender yang kemudian membuat akses dan kesempatan perempuan lebih disempitkan dalam upaya memperbaiki tingkat kehidupan. Adapun rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan mengakibatkan perempuan semakin termajinalkan yang diakibatkan oleh struktur sosial, politik, ekonomi yang diskriminatif. Maka, perlu pemberdayaan perempuan yang harus menjadi pusat perhatian pemerintah. Seperti yang diamanatkan GBHN 1999 bahwa pemberdayaan perempuan dimulai dari: *Pertama*, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara melalui kebijaksanaan nasional yang diemban

lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. *Kedua*, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan serta nilai historis perjuangan perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan : *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

1. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan, sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, diantaranya: keterampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal lain diperlukan mengingat masih menguatnya paradigms masyarakat bahwa setinggi-tinggi

pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya. Adapun indikator pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
3. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
5. Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang *egaliter*. Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan ang

memang proporsinya. Jikalau ini semua telah terealisasi, maka perempuan benar-benar telah terberdayakan.

2.1.4 Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan sebuah lembaga yang mengorganisir masyarakat miskin khususnya perempuan –perempuan yang menjadi kepala keluarga. PEKKA mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal Komnas Perempuan yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumber daya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka. Semula upaya ini diberi nama “*Widows project*” yang sepenuhnya didukung dana hibah dari *Japan Sosial Development Fund (JSDF)* melalui *Trust Fund Bank Dunia*. KOMNAS Perempuan kemudian meminta Nani Zulminarni, pada saat itu adalah ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), menjadi Koordinator program ini. Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani kemudian mengusulkan mengintegrasikan kedua gagasan awal ini ke dalam sebuah upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif. Untuk itu “*Widows Project*” atau “Proyek untuk janda” diubah tema dan judulnya menjadi lebih provokatif dan ideologis yaitu dengan menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama

ini terlanjur mempunyai stereotype negatif. Oleh karena itu Nani mengusulkan judul Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA yang disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya kata PEKKA juga dipergunakan untuk meningkatkan Perempuan Kepala Keluarga.

Hingga tahun 2013 tidak kurang dari 9 juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Lebih dari separuh mereka adalah kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Mereka umumnya berusia antara 20-60 tahun, sebagian buta huruf dan tidak pernah duduk dibangku sekolah dasar sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10.000 per hari. Sebagian mereka mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun oleh negara.

PEKKA juga membuka lebih luas komunitas perempuan miskin yang dapat difasilitasi program ini seperti para perempuan yang berstatus mengambang karena suami pergi merantau tak berberita, perempuan hamil dan mempunyai anak setelah ditinggal laki-laki yang tidak bertanggungjawab, lajang yang belum kawin yang menanggung beban keluarga dan para istri yang suaminya cacat atau sakit permanen. Kelompok perempuan ini pun menghadapi stigmatisasi dan persoalan yang mirip dengan para janda pada umumnya.

Program PEKKA secara resmi dimulai pada Desember 2001 dengan visi pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontribusi

membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Adapun misi PEKKA adalah mengorganisir dan memfasilitasi perempuan kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraannya, memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya, mampu berpartisipasi aktif pada proses pembangunan, kehidupan sosial di wilayahnya, memiliki kesadaran kritis akan haknya sebagai manusia dan warga negara, serta mempunyai kontrol terhadap diri dan proses pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

2.1.5 Komponen Program PEKKA

Strategi Seknas PEKKA dioperasionalkan ke dalam program PEKKA yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan, kondisi dan sumberdaya yang tersedia. Adapun program-program tersebut sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi
 - 1) Pengembangan sumberdaya keuangan bersama PEKKA melalui kegiatan simpan pinjam dengan sistem koperasi.
 - 2) Peningkatan sumber pendapatan keluarga PEKKA melalui pengembangan usaha individu dan usaha bersama.
2. Pendidikan Sepanjang Hayat
 - 1) Pemberantasan buta huruf dan angka bagi keluarga PEKKA melalui kelaskeaksaraan fungsional dan akses program Penyetaraan Pendidikan.
 - 2) Akses pendidikan yang murah dan berkualitas termasuk akses beasiswa bagi anak-anak PEKKA yang putus sekolah 9 tahun.

- 3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Mengorganisir Kelas Belajar anak-anak PEKKA.

3. Pemberdayaan Hukum

- 1) Kegiatan penyadaran tentang hak dan perlindungan hukum bagi PEKKA.
- 2) Melatih kader PEKKA menjadi Kader Hukum agar mampu mendampingi akses proses hukum yang adil bagi PEKKA dan keluarganya dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Advokasi reformasi hukum dan proses hukum yang adil gender.

4. Pemberdayaan Politik

- 1) Penyadaran kritis akan hak politik PEKKA
- 2) Mengorganisir PEKKA untuk terlibat dan mengawasi proses pengambilan keputusan diberbagai tingkatan dan terlibat dalam proses politik di berbagai tingkatan.

5. Hak Kesehatan Sepanjang Masa

- 1) Gerakan hidup sehat dan berkualitas melalui kegiatan penyadaran kritis akan hak dan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi.
- 2) Mengembangkan kader-kader kesehatan dari kalangan PEKKA agar dapat mengorganisir akses pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas.
- 3) Advokasi kebijakan terkait hak pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan berkualitas bagi masyarakat miskin.

6. Media Komunitas

- 1) Sistem pendukung kegiatan pengorganisasian PEKKA dan memperjuangkan.

- 2) Hak akses teknologi informasi bagi masyarakat miskin.
- 3) Melatih dan mengembangkan kader-kader pengelola dan pengembang media rakyat termasuk radio komunitas, video komunitas, fotografi, dan penulisan.
- 4) Mengembangkan penggunaan media komunitas untuk kegiatan pendidikan bagi rakyat, kampanye perubahan sosial, dan advokasi kebijakan.

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan kualitas sumberdaya perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang rendah. Data dasar Sekretariat Nasional PEKKA di 8 provinsi menunjukkan bahwa PEKKA umumnya berusia antara 20-60 tahun, lebih dari 38,8 % buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10.000 per hari. Riset Seknas PEKKA tahun 2009 menunjukkan bahwa 55 % PEKKA hidup di bawah garis kemiskinan Indonesia dan sepertiga komunitas PEKKA tidak bisa mendapatkan akses jamkesmas dan BLT. Paling tidak 78% PEKKA yang bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kurang dari 50% PEKKA sesungguhnya mencatatkan perkawinannya.

2.1.6 Konsep Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan

“pendapatan dapat di artikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan (Reksoprayitno, hlm.79).

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktivitas pokok atau pekerjaan pokok. pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok. Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan

dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula (Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol.IV No.7:9).

Menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dipengaruhi dan permintaan di pasar faktor produksi

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor-faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya (Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol. IV No.7:9).

2.1.7 Konsep Tabungan

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat.

Menurut Samuelson (1996) bahwa orang kaya lebih banyak menabung daripada orang miskin tidak hanya dalam jumlah absolutnya saja, tetapi juga dalam presentase dari seluruh pendapatannya. Orang yang terlalu miskin jelas tidak akan mampu menabung sama sekali. Mereka bahkan membelanjakan uangnya lebih banyak daripada yang mereka peroleh dari pendapatannya. Kekurangannya akan tertutupi dari hutang atau mengambil tabungan yang telah ada sebelumnya. Dari pendapat Samuelson ini dapat dikatakan bahwa tingkat tabungan juga dipengaruhi oleh distribusi pendapatan, karena makin kurang orang miskin maka jumlah orang yang akan menabung akan semakin banyak

Konsep tabungan selanjutnya menurut Duesemberry, yaitu pendapatan relatiflah yang menentukan konsumsi suatu negara (Ackley Gardner, 1991). Dengan turunnya pendapatan maka mereka berusaha melakukan pengeluaran konsumsi yang sedikit mungkin apabila selama periode kepulihan (recovery) berikutnya, pendapatan

akan naik ke arah yang sama dengan tingkat yang tertinggi yang pernah dicapainya dalam periode terdahulu, maka gerak naiknya konsumsi pun berlangsung.

2.1.8 Konsep Konsumsi

Menurut Suherman Rosyidi, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Sedangkan menurut N. Gregory Mankiw, konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti makanan, pakaian. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan.

Konsumsi terbagi menjadi 2 yakni konsumsi rutin dan konsumsi sementara. Konsumsi rutin adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa secara terus menerus dikeluarkan selama beberapa tahun. Konsumsi sementara adalah setiap tambahan yang tidak terduga terhadap konsumsi rutin (Diulio, 1993). Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, biaya jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi

kebutuhannya. Keputusan konsumsi rumah tangga dipengaruhi keseluruhan perilaku baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi rumah tangga untuk jangka panjang adalah penting karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk analisa jangka pendek peranannya penting dalam menentukan permintaan aggregate. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, namun penambahan konsumsi yang terjadi, lebih rendah dari pada penambahan pendapatan yang berlaku. Akan tetapi, pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, bisa saja seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi sehingga tabungan adalah nol. Bahkan terpaksa konsumsi dibiayai dari kekayaan atau pendapatan masa lalu. Kondisi ini disebut dissaving atau mengorek tabungan (Sukirno, 1996).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Trisna Susianda 2014	Peranan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Janda di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa program PEKKA di Kecamatan Tangan-tangan sudah sangat banyak membantu keluarga janda. Peranan PEKKA sangat terlihat terhadap peningkatan pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang tergolong miskin sebelum dan sesudah bergabung dengan kegiatan PEKKA di Kecamatan Tangan-tangan. Disamping itu dalam pelaksanaan juga masih terdapat kelemahan dan kendala-kendala baik oleh pengelola maupun

				oleh anggota yang namun tidak begitu berpengaruh terhadap proses pelaksanaan program PEKKA secara umum.
2	Nika Rizqi Fitrina, 2016	Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan	Deskriptif Kualitatif	Faktor-faktor pendukung perempuan dalam mengembangkan (KUB) Serang adalah adanya motivasi perempuan, dukungan keluarga serta dukungan pemerintah yang membuat perempuan semakin antusias menjalankan usaha bersama. Faktor-faktor penghambat adalah kurangnya modal uang dan bahan baku, serta permintaan pasar yang masih tergantung di wilayah Kabupaten Grobogan.
3	Anifatus Solihah, 2016	Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian adalah Pemberdayaan perempuan melalui Home Industry Bulu Mata di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, telah ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan perempuan pengrajin bulu mata terhadap pendapatan keluarga meningkat cukup signifikan, yaitu dari pendapatan suami yang rata-rata hanya Rp. 500.000, sampai Rp. 750.000-meningkat menjadi Rp. 1.750.000, setelah ditambah pendapatan isteri dari upah menjadi pengrajin bulu mata. Pendapatan perempuan pengrajin bulu mata juga merupakan pendapatan keluarga. Penggunaan pendapatan merupakan penggunaan atau belanja untuk kebutuhan keluarga. Penggunaan untuk kebutuhan keluarga tersebut, antara lain untuk mencukupi

				kebutuhan pokok sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah dan juga untuk kebutuhan yang sifatnya sosial, seperti arisan, dan bowo.
4	Novia Handriati	Pelaksanaan Peran Wanita dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga dalam tinjauan al-Qur'an tidak diatur secara tegas, dalam beberapa ayat masih dalam bentuk yang umum. Pada ketentuan UU No.39 tahun 1999 dijelaskan wanita sebagai manusia yang mempunyai hak untuk bekerja demi kelangsungan hidupnya dan keluarganya, disisi lain sebagai seorang istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya.
5	Fitrina, Nika Rizqi. 2016	Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan kegiatan yang berlangsung di KUB Serang selangkah lebih maju dibandingkan KUB lain di Desa Pulorejo. KUB Serang tidak hanya memproduksi batik dalam bentuk lembaran saja, akan tetapi KUB Serang sudah berani membuat inovasi produk. Berdasarkan konsep partisipasi, partisipasi hanya sebagai cara program tersebut hanya tahap menuju pemberdayaan karena perempuan hanya sebagai objek. Faktor-faktor pendukung perempuan dalam mengembangkan (KUB) Serang adalah adanya motivasi perempuan, dukungan keluarga serta dukungan pemerintah yang membuat perempuan semakin antusias menjalankan usaha bersama. Faktor-faktor

				penghambat adalah kurangnya modal uang dan bahan baku, serta permintaan pasar yang masih tergantung di wilayah Kabupaten Grobogan.
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah 2019

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pemberdayaan adalah kemampuan seseorang untuk memampukan orang lain atau sesama dalam menjawab dinamika kehidupan pribadi maupun anggota keluarga. Sasarannya disini adalah kaum perempuan atau janda ataupun ditinggalkan suami meninggal, dan merantau yang tak kunjung kembali.

Umumnya di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di Kabupaten Lembata Kecamatan Ile Ape adalah seorang gadis lajang yang bernama Bernadette Deram Langobelen yang sangat mempunyai kepedulian terhadap kaum perempuan. Dan dengan ketulusan hati dan dilandasi kepedulian terhadap kaum perempuan, kini dia menjadi orang terdepan yang memperjuangkan, berikhtiar dan berusaha dengan jeripayah tanpa putus asa memberdayakan kaum perempuan sebagai kepala keluarga dengan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi rumah tangga dengan tiga sasaran yakni

1. Pendapatan

Yaitu meningkatkan keterampilan dalam tenun ikat dari berbagai motif tenunan dengan narasumber penenun tersohor setempat.

2. Tabungan

Diwadahi dengan mengadakan simpan pinjam dalam bentuk uang tunai

3. Konsumsi

Yakni pengadaan sembako (9 bahan pokok) yang langsung memenuhi keperluan hidup sehari-hari dengan harga terjangkau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pemikiran penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



